

Perbandingan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019 dan 2024

Salma Zulfa Nur Habibah¹, Rachel Hisanaah Tsabitah Aldjabri², Nia Rafa Ayu³, Galang Putra Susilo⁴, Hafiz Zaki Hanifan⁵

Program Studi Ilmu Politik¹²³⁴⁵

Email Korespondensi: 2310413045@mahasiswa.upnvj.ac.id,



INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Research Article

Kata Kunci: Partai Golkar, Pendidikan Politik, Perolehan Suara, Pemilu

Keyword : Golkar Party, Political Education, Vote Acquisition, Election

Article History

Dikirim : 1 November 2024

Diterima: 01 Desember 2024

Dipublikasi: 28 Desember 2024

Penelitian ini membandingkan peran pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dalam upaya meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data primer berasal dari wawancara dengan narasumber internal Partai Golkar serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, pendidikan politik Partai Golkar masih bersifat konvensional, elitis, dan terbatas. Sementara itu, pada Pemilu 2024, strategi yang digunakan lebih modern dan partisipatif, antara lain melalui pemanfaatan media sosial, pendirian Golkar Institute, serta kolaborasi dengan KPU melalui program Rumah Pintar Pemilu. Meskipun terdapat peningkatan suara dari 12,31% menjadi 15,29%, penelitian ini menilai bahwa pendidikan politik bukanlah satu-satunya faktor penentu peningkatan tersebut. Efektivitasnya sebagai faktor utama dinilai masih terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan politik dalam memperkuat demokrasi, namun pelaksanaannya perlu didukung oleh prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan evaluasi yang berkelanjutan guna mendorong partisipasi politik yang lebih berkualitas.

ABSTRACT

This study compares the role of political education conducted by the Golkar Party in increasing vote acquisition during the 2019 and 2024 general elections. It employs a descriptive qualitative method, using primary data from interviews with internal Golkar Party sources and secondary data from literature reviews. The findings show that in the 2019 election, Golkar's political education remained conventional, elitist, and limited in scope. In contrast, the 2024 election saw the adoption of more modern and participatory strategies, including the use of social media, the establishment of the Golkar Institute, and collaboration with the General Elections Commission (KPU) through the "Rumah Pintar Pemilu" program. Although there was an increase in vote share from 12.31% to 15.29%, the study concludes that political education was not the sole determining factor in this improvement, and its effectiveness as the main driver remains limited. These findings highlight the importance of political education in strengthening democracy, but emphasize that it must be supported by principles of inclusivity, sustainability, and continuous evaluation to foster more meaningful and higher-quality political participation.

Pendahuluan

Partai politik memiliki peran esensial dalam sistem demokrasi, tidak hanya sebagai sarana representasi politik, tetapi juga sebagai agen pendidikan politik bagi masyarakat. John Aldrich (1995) menyatakan bahwa partai politik dapat dilihat sebagai koalisi elit yang bertujuan untuk merebut dan menggunakan jabatan politik. Sebagai organisasi yang dibentuk untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme pemilu, partai politik memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi politik warga negara.

Di Indonesia, pendidikan politik menjadi salah satu fungsi utama partai politik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pendidikan politik yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berpolitik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi politik dan perolehan suara bagi partai. Hal ini sejalan dengan pendapat Verba, Schlozman, dan Brady (1995) dalam *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*, yang menekankan bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam faktanya bahwa peran partai politik dalam pendidikan politik masih belum optimal. Metode dan materi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik seringkali bersifat konseptual dan kurang aplikatif. Selain itu, metode evaluasi dalam pemberian pendidikan politik tidak berjalan dengan efektif, sehingga peran partai politik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara menjadi kurang maksimal.

Partai Golkar (Golongan karya) adalah salah satu partai politik terbesar dan terlama di Indonesia. Partai yang didirikan pada 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman, dengan tujuan awal sebagai alat politik untuk menjaga stabilitas nasional dan mengatasi ancaman ideologi komunis serta perpecahan politik pada masa itu. Partai Golkar berkembang menjadi kekuatan politik dominan selama era Orde Baru. Meskipun mengalami pasang surut dalam era reformasi, partai ini tetap menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dalam setiap pemilu.

Sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, partai Golkar tidak luput dari sorotan dalam

melakukan kegiatan kepartaiannya serta output dari partai golkar itu sendiri. Pada Pemilu 2019 dan 2024, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam meningkatkan jumlah perolehan suara. Dalam Pemilu 2019, Partai Golkar memperoleh 12,31% atau sekitar 17.229.789 suara nasional dan menempati posisi ketiga setelah PDI-P dan Gerindra (KPU RI, 2019). Pada Pemilu 2024, Partai Golkar berhasil meningkatkan perolehan suaranya menjadi 15,29% atau sekitar 23.208.654 suara nasional dan menempati posisi kedua setelah PDI-P (BPS, 2025). Menurut CNBC Indonesia (2024), peningkatan ini menunjukkan adanya strategi baru dalam pendidikan politik yang diterapkan oleh Partai Golkar untuk meningkatkan elektabilitas. Dengan lanskap politik yang terus berubah, Partai Golkar perlu terus beradaptasi dengan berbagai metode pendidikan politik yang lebih efektif terutama dalam menjangkau generasi muda dan pemilih pemula. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan peran pendidikan Partai Golkar dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, serta dampaknya terhadap peningkatan jumlah perolehan suara.

Sebagai bentuk kajian terhadap penelitian sebelumnya, telah dilakukan beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasyim & Azkia (2023), penulis menjelaskan bahwa pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak pilih serta pemahaman tentang dinamika politik yang berkembang. Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik dapat menumbuhkan kesadaran dan mendorong pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan politik ini mencakup stimulus yang diberikan, pengaruh lingkungan sosial, serta sistem politik yang diharapkan oleh pemilih pemula. Temuan ini tentu relevan dalam konteks keberhasilan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik yang efektif tidak hanya sebatas sosialisasi hak pilih, tetapi juga harus mencakup strategi yang lebih mendalam dalam membentuk pemahaman politik masyarakat. Oleh karena itu, studi ini menjadi

dasar untuk menganalisis bagaimana Partai Golkar menerapkan pendidikan politiknya dan sejauh mana strategi yang mereka gunakan dalam Pemilu 2019 dan 2024 berkontribusi terhadap peningkatan jumlah suara yang diperoleh. Peningkatan suara yang cukup signifikan ini mengindikasikan bahwa strategi baru, termasuk dalam bidang pendidikan politik, telah diterapkan oleh Partai Golkar. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari hipotesis utama bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Golkar berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan jumlah perolehan suara pada Pemilu 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Dalam literatur yang sudah ada, gap penelitian yang perlu dieksplorasi adalah sejauh mana pendidikan politik Partai Golkar dan bagaimana partai ini mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam menjalankan strategi politiknya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi pendekatan yang digunakan Partai Golkar dalam menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula, termasuk pemanfaatan media digital sebagai sarana pendidikan politik. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana Partai Golkar mengelola program pendidikan politiknya agar lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan berkontribusi terhadap perolehan suara yang lebih besar di setiap pemilu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi partai politik dalam merancang strategi pendidikan politik yang lebih efektif serta menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan penjelasan serta sedikit penjabaran di atas yang telah penulis sampaikan, berikut rumusan masalah yang penulis rumuskan, yaitu Bagaimana perbandingan pendidikan politik Partai Golkar dalam upaya meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2019 dan 2024?

Tinjauan Pustaka

Pendidikan politik adalah proses pembentukan orientasi politik masyarakat melalui penyampaian informasi dan pengetahuan politik. Pendidikan politik bertujuan agar warga negara

memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem politik, hak dan kewajiban politik mereka, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik (Surbakti, 1992).

Ramlan menekankan bahwa pendidikan politik bukan sekadar transfer informasi, melainkan proses internalisasi nilai-nilai politik, seperti demokrasi, partisipasi, tanggung jawab, dan toleransi. Ia mengklasifikasikan pendidikan politik dalam beberapa bentuk, yaitu pendidikan politik yang bersifat formal (melalui lembaga pendidikan), non-formal (melalui pelatihan atau penyuluhan), dan informal (melalui media massa, diskusi keluarga, atau organisasi sosial). Tujuan akhirnya adalah menciptakan warga negara yang melek politik (political literate) dan mampu menjadi subjek aktif dalam proses demokrasi.

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman masyarakat tentang politik, termasuk hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi. Pendidikan politik membahas tentang bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi dan memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Andari, 2024). Pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi (Kurniawan, 2024). Dalam konteks partai politik, pendidikan politik menjadi instrumen utama untuk memperkuat basis pemilih, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program partai, dan membangun loyalitas politik.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini memuat beberapa cakupan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang pendidikan politik partai golkar. Hal ini dilakukan juga untuk menganalisis peningkatan perolehan suara partai golkar dalam pemilu. Serta untuk mengidentifikasi apa saja kesenjangan, kekurangan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu. Berbagai penelitian terdahulu memberikan pandangan terhadap peran dari pendidikan politik untuk partai politik. Penelitian oleh Lubis, Al Rafni, Suryanef, dan Hasrul (2024) berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai oleh DPD Partai Golkar Sumatera Barat”

mengkaji pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Golkar Sumatera Barat periode 2020–2025 melalui pendekatan kualitatif, yang menemukan bahwa kegiatan pendidikan politik internal partai dilaksanakan minimal sekali setahun melalui berbagai bentuk seperti diskusi, seminar, pelatihan, dan bimtek, dengan tujuan memperkuat pemahaman ideologis kader dan meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika politik; pelaksanaan kegiatan ini sangat bergantung pada musyawarah daerah, anggaran, dan kebutuhan partai, namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya fasilitas, komunikasi internal yang tidak optimal, rendahnya partisipasi kader, serta pola pendidikan yang cenderung monoton; meski telah dilakukan upaya seperti penggalangan dana internal dan coaching kader, tantangan ini tetap memerlukan perhatian jangka panjang; meskipun studi ini cukup komprehensif di tingkat daerah, terdapat kekurangan dalam cakupan wilayah, keterkaitan dengan hasil pemilu, serta adaptasi terhadap media digital dan generasi muda; oleh karena itu, studi lanjutan ini bertujuan memperluas cakupan dengan membandingkan strategi pendidikan politik Partai Golkar pada Pemilu 2019 dan 2024 untuk melihat efektivitasnya dalam membentuk kedekatan dengan pemilih muda dan meningkatkan kesadaran serta loyalitas politik di tengah dinamika demokrasi yang terus berubah.

Iqbal Pratama (2023) dalam karya berjudul “Pengaruh Pendidikan Politik dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih (Studi Kasus DPW Partai Nasdem Aceh)” mengkaji strategi pendidikan politik yang dijalankan oleh Partai Nasdem Aceh dalam upaya meningkatkan partisipasi kader dan masyarakat menjelang Pemilu 2019, dengan pendekatan kualitatif yang mengidentifikasi empat bentuk utama pendidikan politik, yakni pendidikan keNasdeman, pendidikan politik perempuan, pendidikan loyalitas kader, serta pendidikan politik bagi masyarakat umum; meskipun program-program tersebut menunjukkan upaya konkret, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti pragmatisme kader, minimnya akses terhadap pendidikan politik bagi perempuan, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses edukasi politik oleh partai; meski memberikan kontribusi pada wacana pendidikan politik di tingkat lokal, penelitian ini memiliki

keterbatasan karena hanya berfokus pada konteks Pemilu 2019 tanpa mengeksplorasi dinamika pasca-pemilu dan tidak mempertimbangkan aspek digitalisasi dalam strategi pendidikan politik, khususnya dalam menjangkau pemilih muda; untuk menjawab kekosongan tersebut, penelitian lanjutan ini bertujuan membandingkan pola pendidikan politik Partai Golkar antara Pemilu 2019 dan 2024, sekaligus mengkaji bagaimana strategi tersebut berdampak terhadap peningkatan jumlah suara serta bagaimana partai memanfaatkan media digital untuk memperkuat kedekatan dengan generasi muda sebagai bagian dari transformasi pendidikan politik dalam era demokrasi digital.

Andiwi Meifilina (2021) mengeksplorasi bagaimana media sosial digunakan sebagai alat komunikasi politik oleh Partai Golkar Blitar dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama pemilih muda. Strategi partai ini menggunakan kerangka komunikasi Harold D. Lasswell dan dilakukan melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan podcast. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana penting untuk mendekatkan partai dengan konstituen dan memperluas jangkauan pendidikan politik ke kalangan muda. Meski menarik, penelitian ini hanya bersifat deskriptif tanpa mengevaluasi apakah pendekatan tersebut berdampak pada peningkatan dukungan suara partai. Selain itu, fokusnya hanya pada satu daerah dan tidak mengkaji sejauh mana strategi digital ini diadopsi secara nasional oleh Golkar. Penelitian ini menanggapi celah tersebut dengan cara membandingkan praktik pendidikan politik Golkar dari waktu ke waktu (2019–2024), sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap perolehan suara, terutama dengan masuknya media sosial sebagai kanal pendidikan politik yang dominan di kalangan pemilih muda.

Abby Alfianda (2023) dalam jurnal *De Cive* berjudul “Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur” menyoroti peran strategis pendidikan politik dalam membangun semangat demokrasi di kalangan generasi muda dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur bersama pihak Bakesbangpol; hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik masih

belum efektif akibat rendahnya minat generasi muda serta keterbatasan fasilitas dan pendampingan dari pemerintah, sementara gap utama terletak pada minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses sosialisasi dan belum adanya evaluasi komprehensif terhadap efektivitas metode yang digunakan; dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menjadi landasan untuk membandingkan strategi pendidikan politik Partai Golkar dalam meningkatkan elektabilitas pada Pemilu 2019 dan 2024, yang juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada adaptasi strategi partai, termasuk pemanfaatan media digital dan pendekatan komunitas yang berhasil mendongkrak perolehan suara di Pemilu 2024; namun demikian, kajian ini masih memiliki celah berupa belum adanya analisis komparatif antar partai serta evaluasi mendalam terhadap efektivitas media sosial dalam membentuk pemahaman dan kesadaran politik pemilih, khususnya di kalangan generasi muda yang semakin terpapar oleh dinamika politik digital.

Rara Suryani dan Suryanef (2022) memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di tingkat lokal dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara dan dokumentasi; penelitian ini menemukan bahwa Partai PAN dan Partai Gerindra menyelenggarakan pendidikan politik dalam berbagai format seperti seminar, pelatihan, workshop, dan bimtek yang menyasar anggota internal partai dan masyarakat umum, dengan dukungan keberhasilan berupa SDM yang memadai, antusiasme warga, dan ketersediaan dana, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan pendanaan serta sikap apatis dan skeptis masyarakat; temuan ini memiliki keterkaitan metodologis dengan penelitian “Peran Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Jumlah Perolehan Suara: Studi Perbandingan Pemilu 2019 dan 2024” yang juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menilai efektivitas pendidikan politik partai, meski dengan fokus berbeda, yakni pada kontribusinya terhadap elektabilitas partai di tingkat nasional; di sisi lain, terdapat beberapa gap dalam studi Suryani dan Suryanef seperti terbatasnya cakupan pada konteks lokal tanpa pembahasan kuantitatif mengenai dampak terhadap suara partai, absennya analisis komparatif antar periode pemilu, serta belum

tergambarnya adaptasi strategi pendidikan politik terhadap perkembangan teknologi, terutama media sosial, yang menjadi elemen penting dalam pendekatan pendidikan politik modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai peran pendidikan politik yang diterapkan oleh Partai Golkar dalam upaya meningkatkan perolehan suara. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau sekelompok individu yang dianggap sebagai fokus dari masalah sosial tersebut (Creswell, 2009). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi (Sari et al., 2022). Maka dari itu, Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat langkah-langkah yang digunakan oleh Partai Golkar dalam memberikan pendidikan politik yang berdampak terhadap perolehan suara. Guna untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai peran pendidikan politik Partai Golkar dalam memperoleh suara. Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu bersumber pada data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui hasil wawancara dengan narasumber berasal dari anggota atau tokoh politik dari Partai Golkar, wawancara dilakukan oleh Alia Noorayu Laksono Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakart. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi literatur dan dokumentasi, dengan menelaah jurnal ilmiah, buku dan website resmi yang relevan dengan penelitian. Tujuan dari studi literatur untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai peran pendidikan politik Partai Golkar dalam memperoleh suara pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, serta untuk memperkuat argumen dan temuan dalam penelitian. Teknik Analisis data merupakan aspek penting dalam penelitian, karena teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data sangat berpengaruh terhadap hasil pembahasan dalam penelitian. Sehingga, perlu menggunakan teknik yang sesuai dengan fokus pembahasan dalam

penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang digunakan untuk dapat lebih mengeksplor dari sumber data yang telah didapatkan. Berikut teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang merujuk kepada Miles dan Huberman (1994), yaitu:

1. Reduksi Data: Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya yaitu dengan memilah data, merancang tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data yang sesuai dengan bidangnya serta merangkum beberapa analisis dan dibuat dalam bentuk kalimat. Dalam hal ini, peneliti memilah data yang relevan dengan pembahasan mengenai peran pendidikan politik Partai Golkar dalam memperoleh suara.
2. Penyajian Data: Setelah memilah data yang relevan, data yang telah dipilah disajikan dalam bentuk narasi, dan dihubungkan dengan data-data yang telah dipilah dan dikategorikan.
3. Penarikan Kesimpulan: Setelah data disajikan dalam bentuk narasi, peneliti bisa mengambil penarikan kesimpulan dari hasil data yang telah melalui hasil reduksi data dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Perbandingan bentuk dan Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Politik Golkar pada 2019 dan 2024

Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam konteks ini, Partai Golkar menjadi salah satu partai yang cukup aktif dalam melaksanakan pendidikan politik baik secara internal melalui kaderisasi maupun eksternal kepada masyarakat. Pada Pemilu 2019, bentuk pendidikan politik Partai Golkar masih sangat terpusat pada kegiatan sosialisasi konvensional seperti temu kader, penyebaran pamflet, dan pendekatan langsung ke tokoh masyarakat. Meskipun demikian, efektivitasnya belum optimal dalam menjangkau pemilih terutama pemilih muda. Namun, memasuki Pemilu 2024, Partai Golkar melakukan inovasi dalam metode dan strategi pendidikan politik. Salah satu bentuk terobosannya adalah mendirikan Golkar Institute, yang menjadi pusat pelatihan bagi calon pemimpin muda.

Lembaga ini menyelenggarakan Young Political Leaders School dan pelatihan kebijakan publik yang bertujuan membentuk kader yang tidak hanya loyal secara ideologis, tetapi juga kompeten secara teknis (Tempo, 2023).

Selain itu, kerja sama strategis dengan KPU melalui program Rumah Pintar Pemilu (RPP) menjadi bentuk pendidikan politik berbasis kolaborasi institusional. Program ini bersifat terbuka bagi masyarakat umum, khususnya generasi muda, untuk mengenal sistem pemilu, proses demokrasi, serta peran partai politik dalam negara (CNBC Indonesia, 2024). Kegiatan seperti simulasi pemilu, forum diskusi, dan penggunaan media digital (Instagram, YouTube, serta Zoom) menjadi pendekatan baru dalam menjangkau segmen yang sebelumnya apatis atau minim akses terhadap informasi politik.

Partai Golkar juga memaksimalkan media sosial sebagai alat komunikasi dua arah. Konten pendidikan politik dikemas dalam bentuk video singkat, infografis, serta podcast dengan narasumber internal partai maupun akademisi. Hal ini sejalan dengan pendekatan komunikasi politik modern yang menekankan interaktivitas dan kemudahan akses informasi (Meifilina, 2021). Dari sisi internal partai, pelatihan kader dilakukan secara berjenjang, tidak hanya menjelang pemilu. Materi yang diberikan mencakup pemahaman ideologi partai, strategi kampanye, teknik komunikasi politik, hingga pemanfaatan digital tools. Pelatihan ini menjadi investasi jangka panjang partai dalam membangun mesin politik yang profesional dan responsif terhadap perkembangan zaman (Lubis et al., 2024).

Bisa dikatakan bahwa pada periode Pemilu 2019, Partai Golkar dalam menerapkan Pendidikan Politiknya lebih bersifat fragmentatif, konvensional dan berbasis struktur internal. Pendidikan Politik yang diterapkan seperti; diskusi partai, sosialisasi program partai melalui pengurus daerah seperti DPD/DPC, serta pelatihan kader secara internal dan tidak bersifat inklusif (Adrian, 2022). Bahkan tak hanya itu, menurut Nabila et al. (2024) bahwa penetrasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar masih bersifat lemah. Hal ini dikarenakan dalam proses pendidikan politiknya hanya beberapa kecamatan yang terekspos tidak mencakup keseluruhan kecamatan. Pendidikan Politik pada periode Pemilu 2019, secara keseluruhan pelaksanaannya masih didominasi oleh elit politik dan tokoh-tokoh

senior yang berpengaruh dalam partai. Hal ini, mengakibatkan partai Golkar kurang adaptif terhadap pesatnya perubahan politik generasi muda. Pendidikan politik lebih banyak difokuskan sebagai alat penguatan mesin partai menjelang kontestasi elektoral, ketimbang sebagai proses transformasi nilai-nilai kewargaan.

Disisi lain, pada periode Pemilu 2024 sifat yang menonjol dalam pendidikan politiknya yaitu terletak pada pendekatan yang lebih modern dan mengedepankan unsur partisipatifnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada periode ini memaksimalkan pemanfaatan media sosial, yang mencakup ke dalam kampanye bersifat dialog, penyebaran nilai-nilai kebangsaan. Partai Golkar secara aktif telah menyelenggarakan pendidikan politik dan pelatihan kaderisasi secara terbuka untuk umum yang melibatkan peran masyarakat dan akademisi lokal. Hal ini juga selaras dengan hasil wawancara kami, bahwa pada periode Pemilu 2024 praktik yang digunakan dalam menyampaikan pendidikan politik lebih memanfaatkan media sosial, karena dinilai lebih efektif dan lebih tersampaikan secara luas terhadap masyarakat. Dari penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik aspek yang menjadi pembeda dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai Golkar pada Pemilu 2019 dan 2024.

Aspek	2019	2024
Metode	Konvensional (tatap muka)	Digital, hybrid, berbasis komunitas lokal
Cakupan	Tidak menyeluruh/terbatas	Lebih meluas dalam masyarakat (dibantu oleh Pengurus DPD/DPC)
Segmentasi	Elit partai dan kader senior	Pemilih muda, pemilih pemula dan relawan lokal
Media	Forum diskusi partai (seminar)	Media sosial, webinar dan konten edukatif
Evaluasi Kinerja	Kurang terstruktur	Mengedepankan partisipasi

		masyarakat
--	--	------------

Tabel. 1. Aspek Perbandingan Pelaksanaan Pendidikan Politik partai Golkar Pada Pemilu 2019 dan 2024.

1.2 Dampak Pelaksanaan Pendidikan Politik terhadap Peningkatan Suara, Khususnya di Kalangan Pemilih Muda dan Pemula

Peningkatan suara Partai Golkar dari 12,31% pada Pemilu 2019 menjadi 15,29% pada Pemilu 2024 tentu mencerminkan suatu keberhasilan politik yang signifikan. Dalam konteks demografi, proporsi pemilih muda (usia 17–35 tahun) yang mencapai sekitar 55% dari total pemilih nasional menjadi variabel penting yang ikut mendorong pergeseran elektoral tersebut (BPS, 2025). Di tengah lanskap politik yang semakin digital dan kompetitif, berbagai strategi pendidikan politik pun diterapkan oleh Partai Golkar, mulai dari pelatihan kader, pendirian Golkar Institute, hingga kolaborasi dengan KPU dalam bentuk Rumah Pintar Pemilu (Meifilina, 2021; Lubis et al., 2024).

Berbagai pendekatan tersebut dikemas dengan metode yang lebih adaptif: seperti roadshow politik ke sekolah dan pesantren, diskusi publik bersama pemuda lokal, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye sekaligus edukasi. Temuan dari Sari dan Prakoso (2023) menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis digital seperti Zoom meeting, podcast, dan infografis interaktif mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula di beberapa daerah. Strategi ini dinilai memperkuat hubungan emosional antara partai dan konstituen muda (Zulfitri, 2023). Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep political efficacy yang dikemukakan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995), di mana pendidikan politik berkualitas mampu meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam berpartisipasi politik. Namun demikian, peneliti menilai bahwa meskipun pendidikan politik tersebut memiliki nilai dan kontribusi, bukan itu satu-satunya atau bahkan faktor utama yang menyebabkan kenaikan suara Golkar. Kenaikan suara tersebut kemungkinan besar juga dipengaruhi oleh strategi kampanye yang masif, kekuatan figur caleg di daerah tertentu, dinamika politik nasional, serta popularitas isu yang dimainkan partai. Di daerah-daerah seperti Jatim VI dan

Banten III, keberhasilan Golkar meningkatkan jumlah kursi legislatif juga tidak lepas dari peran tokoh yang kuat secara personal dan pendekatan logistik yang matang (Tempo, 2024).

Jika diamati kembali, program pendidikan politik yang diklaim partai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh program tersebut, terutama yang berada di wilayah terpencil, masyarakat ekonomi rendah, dan kelompok yang tidak memiliki akses teknologi. Bahkan dalam banyak kasus, pendidikan politik oleh partai hanya dilakukan di ruang internal atau pada momen menjelang pemilu, sehingga lebih terkesan simbolik dibandingkan substansial (Hermawan, 2020)

Efektivitas program tersebut pun dipertanyakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, efektivitas pendidikan politik oleh partai di tingkat masyarakat hanya mencapai 38,31% kategori yang termasuk rendah. Dalam konteks ini, sangat mungkin bahwa masyarakat lebih banyak mendapat pendidikan politik dari lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan media, daripada dari partai politik itu sendiri (Hasyim & Azkia, 2023). Bahkan partai politik justru menjadi aktor dominan dalam pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran administratif (Ningrum, 2024). Situasi ini menimbulkan kontradiksi di satu sisi partai berbicara tentang pendidikan politik, tetapi di sisi lain justru memperlihatkan praktik politik yang tidak mendidik. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa peran pendidikan politik oleh partai dalam konteks ini belum dapat dikatakan sebagai faktor dominan dalam peningkatan suara. Ia memang penting dan perlu, namun belum berjalan secara maksimal dan belum menyentuh semua segmen masyarakat. Jika dibiarkan hanya sebagai kewajiban formal atau alat kampanye, maka pendidikan politik akan kehilangan makna sejatinya sebagai proses pemberdayaan warga negara dalam sistem demokrasi. Dengan ini pendidikan politik perlu dikuatkan dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan transparansi. Bukan hanya menjelang pemilu, tetapi menjadi proses berkelanjutan yang melibatkan semua pihak: partai, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, serta lembaga pendidikan. Dengan demikian, peningkatan suara dalam pemilu tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga

merepresentasikan kualitas partisipasi warga negara yang sadar, kritis, dan aktif secara politik.

Kesimpulan

Perbandingan pendidikan politik Partai Golkar pada Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pendekatan, cakupan, dan strategi pelaksanaannya. Pada Pemilu 2019, pendidikan politik Partai Golkar masih bersifat konvensional, elitis, dan terbatas pada struktur internal partai. Kegiatannya banyak berpusat pada temu kader, diskusi tertutup, serta pelatihan internal yang belum menyentuh segmen pemilih muda secara optimal. Pelaksanaannya pun dinilai kurang merata dan lebih berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek. Sebaliknya, pada Pemilu 2024, Partai Golkar mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan partisipatif. Inovasi seperti pendirian Golkar Institute, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi dengan KPU melalui Rumah Pintar Pemilu memperluas jangkauan pendidikan politik ke kalangan pemilih muda dan pemula. Strategi ini memperlihatkan adanya kesadaran partai terhadap pentingnya digitalisasi komunikasi politik serta keterlibatan masyarakat sipil dan akademisi. Meskipun pendekatan pendidikan politik Golkar pada 2024 dinilai lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks zaman, efektivitasnya sebagai faktor utama peningkatan suara masih diperdebatkan. Kenaikan suara Golkar juga sangat mungkin dipengaruhi oleh kekuatan tokoh lokal, strategi logistik, serta dinamika politik nasional. Selain itu, keterbatasan akses di daerah terpencil dan praktik politik yang masih kontradiktif menandakan bahwa pendidikan politik partai belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan substantif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik Partai Golkar pada 2024 lebih progresif dibandingkan 2019, namun belum cukup kuat menjadi faktor dominan dalam peningkatan suara partai. Upaya ini tetap penting, tetapi perlu diperkuat melalui prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan konsistensi agar benar-benar berkontribusi dalam menciptakan partisipasi politik yang berkualitas.

Referensi

Alfianda, A. (2023). *Peran pendidikan politik dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda di Kabupaten Belitung Timur*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(3), 109–119. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1662/1558>

Andari, A, D. (2024, Agustus 16.). *Pengertian dan fungsi pendidikan politik*. UMSU. <https://umsu.ac.id/artikel/pengertian-dan-fungsi-pendidikan-politik/>

ANDRIAN, R. (2022). *FUNGSI PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK* (Doctoral dissertation, Universitas Tanjungpura).

Badan Pusat Statistik. (2025). Hasil penghitungan suara sah partai politik peserta pemilu legislatif tahun 1955-2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTU3MyMx/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2024.html>

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

CNBC Indonesia. (2024, 22 Maret). 3 senjata Golkar jadi bintang Pemilu 2024, kuasai 14 provinsi. CNBC Indonesia.

Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications.

Fikri, F. I. (2023). *Strategi Partai Golkar dalam memenangkan Pemilu tahun 2019 di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/79116/1/FARIZ%20IZZUL%20FIKRI.FISIP.pdf>

Hasyim, A., & Azkia, S. (2023). *Pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam Pemilu 2024*. Jurnal Politik Indonesia, 2(3), 145–160.

Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan, 10(1).

Idrich, J. H. (1995). *Why Parties? The Origin and Transformation of Political Parties in America*. Chicago: University of Chicago Press

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019, 21 Mei). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi merampungkan proses Rekapitulasi Suara Nasional untuk Pemilu 2019, Selasa, 21/5/2019. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7482/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--RI-resmi-merampungkan-proses-Rekapitulasi-Suara-Nasional-untuk-Pemilu-2019--Selasa--21-5-2019->

Ningrum, S. (2024, Oktober 13). Politik Uang, Ancaman Serius untuk Demokrasi di Pemilu. Kompasiana.com. Di akses pada 1 Juni 2024. <https://www.kompasiana.com/sofianingrum1838/670b406bed641573926c9e72/politik-uang-ancaman-serius-untuk-demokrasi-di-pemilu>

Kurniawan, I. (2024, April 13). *Pentingnya pendidikan politik dalam Pilkada 2024*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/pentingnya-pendidikan-politik-dalam-pilkada-2024/>

Lubis, F., Al Rafni, Suryanef, & Hasrul. (2024). Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai oleh DPD Partai Golkar Sumatera Barat. Journal of Education, Cultural and Politics, 4(1), 125–132.

Meifilina, A. (2021). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik. Jurnal Komunikasi Nusantara, 3(2), 101–110.

Miles, B. M., & Huberman, M. A. (1994). *An expanded sourcebook: Qualitative data analysis*. Sage publications.

Nabila, K. K., Huda, M. M., & Kasiarni, S. (2024). Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban. *Journal of Political Issues*, 6(1), 46-58.

Partai Golongan Karya. "Sejarah Partai Golkar". <https://www.partaigolkar.com/profil/>

Pratama, I. (2024). Pengaruh Pendidikan Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih (Studi Kasus DPW Partai Nasdem Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan).

Rahmiyati, M., Reza, M., & Latuda, F. (2023). *Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik: Studi tentang peran media sosial*. Jurnal Governance and Politics, 3(2), 139–150.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. <https://bphn.go.id/data/documents/11uu002.pdf?utm>

Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). Metode penelitian kualitatif. Unisma Press.

Sari, I. P., & Prakoso, A. (2023). *Analisis strategi pendidikan politik Partai Golkar dalam Pemilu 2019 dan 2024*. Jurnal Politik Indonesia Maju, 2(1), 45–60.

Sartori, G. (1970). *Comparing political systems*. New York: Macmillan

Surbakti, R. (1999). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.

Suryani, R., & Suryanef, S. (2022). *Program pendidikan politik oleh partai politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menghadapi Pilkada 2020: Studi pada DPD PAN dan DPC Gerindra di Nagari Talang Kabupaten Solok*. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(1), 46–54. <https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/view/10/15>

Tempo.co. (2023, September 13). *Strategi Golkar menangkan Pemilu 2024: Caleg cadangan hingga tugas khusus Ridwan Kamil*. <https://www.tempo.co/politik/strategi-golkar-menangkan-pemilu-2024-caleg-cadangan-hingga-tugas-khusus-ridwan-kamil-180501>

Verba, S., Schlozman, K. & Brady, H. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.

Zulfitri, R. (2023). *Implementasi pendidikan politik oleh DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat*. *JECCO: Jurnal Civic Education and Communication*, 3(2), 59–68. <https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/download/369/94/>